

STRATEGI KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Atris Fransisco Luma*

* Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado
Corresponding author: atrifransisco95@gmail.com

ABSTRAK

Strategi politik sangatlah penting bagi partai politik dalam menghadapi kompetisi politik dalam sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. Demikian juga bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Artikel ini akan mengkaji strategi yang dilakukan oleh PDI-P Kabupaten Halmahera Barat saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dalam menghadapi Pileg tahun 2019 terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten Halmahera Barat baik yang berbentuk *push marketing*, *pass marketing*, dan *pull marketing*. Dalam hal ini PDI-Perjuangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan pendidikan politik yang membuat masyarakat memahami akan pentingnya mengikuti pemilu. Selain itu, Partai PDI-Perjuangan dikabupaten Halmahera Barat juga berkampanye melalui media cetak, baliho, spanduk yang terpasang di pinggir jalan, dengan begitu visi dan misi Partai PDI-Perjuangan bisa lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: Strategi Politik; Pileg

ABSTRACT

Political strategy is very important for political parties in facing political competition in a general election. The success of a political strategy by a political party in planning and implementing it will play a role in the results of the political party's vote acquisition in the election. Likewise for the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This article will examine the strategies carried out by the PDI-P of West Halmahera Regency during the 2019 Legislative General Election (Pileg). marketing, and pull marketing. In this case, PDI-Perjuangan conducts socialization to the community, and carries out political education that makes people understand the importance of participating in elections. In addition, the PDI-Struggle Party in West Halmahera Regency also campaigns through print media, billboards, and banners posted on the roadside, so that the PDI-Struggle Party's vision and mission can be better known by the general public.

Keywords: Political Strategy; Pileg

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pemilu perlu diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partisipasi rakyat dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara menjadi bagian dari instrumen pemilu. Pemilu pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1955 hingga saat ini. Pemilu pertama memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden Indonesia menggunakan sistem pemilihan yang berbeda-beda tetapi lebih banyak didasarkan pada tercakupnya indikator akuntabilitas, keterwakilan, keadilan, persamaan hak setiap pemilih (equality), (Rumidan Rabi'ah, 2009:68).

Undang-Undang yang dipakai pada pemilu 2019 yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ada yang istimewa dari Pemilihan umum (pemilu) 2019 yang merupakan pesta lima tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia yang sudah digelar, dimana dalam sejarah pesta demokrasi baru pertama kali dilaksana Pemilu Serentak mulai dari Pemilihan DPR-RI, DPD, DPRD, bahkan sampai pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara bersamaan. Ritual politik yang keduabelas sudah digelar dalam perspektif sejarah kehidupan politik Negara kita saat ini sudah diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih 575 Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), 136 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi ataupun Kabupaten/Kota, dan pada tanggal yang sama untuk memilih pasangan Calon presiden dan wakil presiden 2019-2024. maka dari pemilu serentak 2019 inilah menjadi tantangan besar bagi pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya di Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam menjelankan tugas dan fungsinya terlebih khusus dalam menentukan strategi kampanye yang tepat dalam pemilihan umum legislatif 2019.

Strategi politik yang dilakukan oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap masyarakat sangat di perlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. strategi tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing,tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Strategi pada hakekatnya perencanaan (planning) dan Manajemen (management) untuk suatu tujuan. Strategi kampanye yang diterapkan oleh partai politik PDI-Perjuangan, dalam arti bahwa walaupun tidak dapat dipungkiri yang akan berkompetisi untuk memenangkan pemilu legislatif tersebut adalah para caleg, tetapi tidak mengarah pada strategi khusus yang digunakan para kandidat calon legislatif dalam sebuah partai tertentu melaingkan terfokus pada strategi umum yang dimiliki sebuah partai politik yang merupakan kendaraan politik para calon legislatif menuju pemilu untuk kemenangan partai tersebut secara keseluruhan dimana strategi-strategi ini nantinya bisa saja di adopsi oleh para kandidat calon legislatif yang di usung oleh partai politik.

Para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen dan kepala pemilih menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama ditentukan hingga menjelang hari pemungutan suara. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pemilu dalam sistem demokrasi, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada (institusi primordial baik yang bersifat keagamaan maupun kedaerah), mesin-mesin politik yang ada (organisasi social ataupun kelompok kepentingan, baik partai politik, organisasi kepemudaan, dan media), proses pencitraan, sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan yang pada dasarnya hal ini adalah instrument dari serangkaian usaha Pemenangan baik dalam kondisi PEMILU maupaun PEMILUKADA. Hal ini lumrah terjadi sejak bergulirnya Orde Reformasi yang membawa peran terhadap demokratisasi di Indonesia, dimana setiap partai politik berkompetisi dalam setiap pemilu, dan setiap partai politik memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan politik dalam pemilu. Periode 1988 sejak reformasi hingga sekarang atau masa transisi demokrasi Indonesia, proses demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan menuju perbaikan konsep dan pelaksanaannya. Dengan terciptanya pemilu yang transparan tanpa terlalu banyak intervensi atau tekanan, sebagai salah satu parameter kemajuan demokrasi.

Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (target image) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak dibidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak

kelompok sasaran-sasaran. Citra yang diinginkan terkait dengan pilihan tema, gaya, cara konfrontasi dan tawaran sumber daya manusia.

Dengan adanya lembaga penyelenggara pemilu legislative yang bersifat independen yakni KPU (Komisi pemilihan umum), yang tidak ada pada kondisi politik di zaman Orde baru, menjadi satu kemajuan dalam sistem politik Indonesia, dimana sebelumnya di era penguasa orde baru pemilu hanya ajang seremonial untuk mempertegas legitimasi pemerintahan. Strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpatisan konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik, dengan menggunakan berbagai pendekatan termasuk didalamnya memperbaiki isu politik yang akan dijual kepada kelompok pemilih, memperhitungkan kekuatan sendiri, dan mengamati kemampuan partai pesaing yang menjadi rival politik. Sehingga substansi dari pemilu legislative sebagai referensi kekuasaan rakyat dengan hegemoni kekuasaan yang dimilikinya didalam seluruh aspek baik sosial, ekonomi dan politik Indonesia.

Maka sudah seharusnya setiap partai wajib memiliki strategi untuk dapat mendulang suara yang signifikan dari konstituen, dengan konsep pemenangan yang terfokus guna memenangkan partainya, baik maupun pengorganisasian, konsolidasi kader, menggunakan kekuatan organisasi sayap yang dimilikinya, penguasaan terhadap kondisi objektif yang ada dalam areal pertarungan politiknya, propaganda isu, dan sebagainya. Karena tanpa itu, pengaruh dan kekuasaan mustahil diperoleh, maka pada prinsipnya kemenangan dalam pemilu adalah harga mati bagi setiap partai politik.

Pada pemilu legislatif di Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 17 April 2019 dari hasil penghitungan secara manual, partai berlambang banteng dan moncong putih yang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih suara sebanyak 8,766 suara.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Strategi Politik

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *strategos*, yang diartikan sebagai tindakan-tindakan yang ditempuh oleh organisasi-organisasi untuk mencapai sasaran dan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dibutuhkan pengambilan keputusan strategis. Menurut Hunger strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuannya (Arbi Sanit, 1989, hal 13).

Menurut Peter Schoder (2010:26) strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi berbicara teknik pendekatan kontestan pada kelompok pemilih. Oleh karena itu, strategi politik harus dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara instan melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pertarungan politik.

Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politik yang terbantu dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau kontestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan coblos para pemilih (Adman Nursal, 2004 hal 23). Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa calon kepala daerah yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan kepala daerah yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Firmanzah (2008) mengatakan bahwa kampanye politik merupakan semua agenda partai atau perorangan yang berkaitan dengan pengumpulan massa, parade, orasi dengan pemaparan program kerja dan mempengaruhi opini publik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk), dan pengiklanan partai lewat media cetak ataupun elektronik, dengan maksud untuk sosialisasi program kerja dan mempengaruhi opini publik. Secara singkat kampanye harus mulai dipahami dua, yakni kampanye jangka pendek dan jangka panjang. Karena publik tidak hanya melihat partai ataupun kontestan politik lainnya hari ini, tetapi juga masa lalu yang bisa dipastikan akan mempengaruhi elektabilitas partai dimasa mendatang.

Strategi kampanye politik adalah bentuk khusus dari strategi politik. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil

yang baik dalam pemilu, agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat. Ada beberapa strategi kampanye politik yang dikemukakan oleh Firmanzah, yakni sebagai berikut :

1. *Push Marketing*

Dalam strategi ini, partai politik berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulan yang diberikan kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan dorongan dan energi untuk pergi kebilik suara dan mencoblos suatu kontestan. Di samping itu, partai politik perlu menyediakan sejumlah alasan yang rasional maupun emosional kepada para pemilih untuk bisa memotivasi mereka agar tergerak dan bersedia mendukung suatu kontestan.

2. *Pass Marketing*

Strategi ini menggunakan individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan massa akan sangat ditentukan oleh pemilihan para influencer ini. Semakin tepat influencer yang dipilih, efek yang diraih pun menjadi semakin besar dalam memengaruhi pendapat, keyakinan dan pikiran publik.

3. *Pull Marketing*

Strategi jenis ini menitikberatkan pada pembentukan image politik yang positif. Supaya simbol dan image politik dapat memiliki dampak yang signifikan, kedua hal tersebut harus mampu membangkitkan sentiment. Pemilih cenderung memilih partai atau kontestan yang memiliki arah yang sama dengan apa yang mereka rasakan.

B. Partai Politik

Partai politik dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa mengutamakan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang serupa atau sama sehingga pikiran dan orientasi mereka dikonsolidasikan (Miriam Budiardjo, 2008 hal 403).

Secara etimologis Partai dapat ditelusuri jejaknya dari bahasa latin, yaitu *partyer* yang bermakna “membagi” atau “memilah” atau bisa juga disejajarkan dengan kata *part* yang bermakna bagian (Damsar, 2012 hal 224). Sedangkan menurut istilah, Santori memberi pengertian partai politik sebagai kelompok politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, dan mampu menempatkan, melalui pemilihan umum, para calon untuk duduk di legislative dan di pemerintahan.

Dalam bukunya Demokrasi di Indonesia: demokrasi parlementer dan demokrasi pancasila Meriam Budiardjo membuat batasan partai politik sebagai suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dan mempunyai tujuan, untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Mark N. Hogapain, Partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (Muslim Mufti, 2012 hal 123).

C. Fungsi Partai Politik

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 11, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik rakyat Indonesia, dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

D. Pemilihan Umum

Pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik Negara demokrasi modern *Lances Castles* (dalam Efriza 2008:357).

Pemilu sebagai alat demokrasi yang berarti memposisikan pemilu dalam fungsi asasi sehingga wahana pembentuk representative government. Menurut UUD 1945 dan Amandemen pasal 22E pengertian pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pemilu adalah dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilu adalah di selenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Desa, presiden, wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu partai politik.
4. Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui perseorangan.
5. Pemilu adalah di selenggarakan oleh suatu komisi pemilu untuk bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pemilihan umum legislative adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan di wilayah provinsi maupun kabupaten kota, kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk pemilihan Anggota DPRD, DPD, dan DPR RI. Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2008 ayat 3,4,5 bahwa dewan perwakilan rakyat, selanjutnya di sebut DPR, dewan perwakilan daerah disebut DPD, dan DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pemilihan umum legislative adalah memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pemilu merupakan wujud dari penerapan demokrasi oleh seluruh warga Negara Indonesia, proses demokrasi akan berjalan dengan baik apabila seluruh menjunjung aturan main yang sudah diterapkan dalam aturan (Firmanza 2010:405).

Dengan demikian, pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu alat yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah, menurut kehendak dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undan-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah di amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Jadi, ditengah masyarakat pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan sejarahnya, pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 11 kali, yaitu mulai tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009, 2014 (Rumidan Rabi'ah, 2009 hal 46-47).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiono, 2015), dengan fokus penelitian mengkaji strategi politik yang dilakukan oleh PDI-P Kabupaten Halmahera Barat pada Pileg tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan

reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhir dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Strategi Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Kabupaten Halmahera Barat

Strategi kampanye yang dilakukan setiap partai politik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk bisa menang dalam pemilu partai mutlak memberikan strategi-strategi politik dalam kampanye. Sebab tanpa strategi, kemenangan sangat tidak mungkin untuk didapatkan. Untuk memahami dan mengkaji strategi kampanye partai PDI-Perjuangan pada pemilu legislative tahun 2019 di kabupaten Halmahera barat. Langkah tersebut penulis ambil karena melihat ada banyak hal dan strategi yang digunakan partai PDI-perjuangan kabupaten Halmahera barat guna meraih kemenangan pada pemilu legislative tahun 2019.

Strategi kampanye yang digunakan partai PDI-perjuangan kabupaten Halmahera barat dalam upaya mempengaruhi masyarakat dan memenangkan pemilihan umum legislative tahun 2019 bermacam-macam, yaitu dengan konsolidasi agar terjadinya pendekatan-pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ketahap berikutnya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti memberikan bantuan untuk masyarakat kurang mampu, anak yatim, kelompok petani, nelayan, dan lain sebagainya. Strategi ini dianggap sudah menjadi strategi yang paling efektif dan dapat diterima oleh masyarakat pada mempengaruhi dan menarik simpati dari pemilih, agar memilih caleg yang bersangkutan yang berasal dari partai PDI-Perjuangan, selain itu strategi ini diharapkan meningkatkan citra partai PDI-perjuangan maupun para calon legislatif.

Adapun strategi yang dilakukan partai PDI-perjuangan kabupaten Halmahera barat juga menggunakan strategi dengan pemasangan baliho dan spanduk di pinggiran jalan raya. suapaya masyarakat juga bisa melihat dan membaca visi dan misi para calon legislative dan juga program-program dari para calon legislatif yang ada di spanduk. Strategi ini merupakan strategi yang sangat umum digunakan oleh calon legislatif maupun partai-partai lainnya dengan tujuan agar masyarakat atau pemilih dapat mengenali siapa calon legislative yang akan dipilihnya dalam pemilihan nanti. Strategi ini bertujuan untuk mempengaruhi dan mendapat simpati dari masyarakat atau pemilih di kabupaten Halmahera barat agar memilih calon legislatif yang bersangkutan atau yang berasal dari partai PDI-Perjuangan.

Selain itu strategi kampanye partai politik maupun sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat maupun simpatisan serta memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Dan juga memeberikan penguatan ideologi yang pertama dari internal partai PDI-Perjuangan, atau DPC hingga, PAC dan kemudian sampai ke Ranting-Ranting maupun simpatisan dan setelah itu barulah melebar keluar dan ini merupakan bagian dari strategi, dimana harapan kader-kader partai PDI-perjuangan di kabupaten Halmahera barat bisa mempengaruhi peningkatan jumlah massa terhadap partai PDI-perjuangan di kabupaten Halmahera barat. Dari temuan penulis bahwa ada banyak strategi-strategi kampanye yang dilakukan PDI-Perjuangan dan calon legislatif lainnya pada pemilu legislatif di kabupaten Halmahera Barat tahun 2019, mendapat calon anggota legislatif terpilih sebanyak 4 kursi dari 25 kursi dengan jumlah suara sebanyak 8.766 suara sah, dengan ini PDI-Perjuangan keluar sebagai pemenang dengan jumlah suara terbanyak di pemilihan umum legislatif tahun 2019 di kabupaten Halmahera barat, namun sedikit jauh berbeda dengan pemilu legislatif tahun 2014 yang penulis temukan, bahwa di pemilu tahun 2014 PDI-Perjuangan memperoleh suara sebanyak 15.014 suara sah dengan jumlah kursi sebanyak 6 kursi.

Fakta lain dari hasil penelitian di lapangan yang ditemukan penulis bahwa proses perekrutan dan penyeleksian yang dilakukan pada para calon legislative sangatlah hati-hati. Khususnya PDI-Perjuangan dengan melakukan perekrutan kader dengan cara tes berbasis online dan dilakukan Psiko tes yang dilakukan langsung oleh DPP PDI-perjuangan, dan adapun cara penyeleksi kader dilihat dari. Pendidikan seorang kader, loyalitas, pengabdian, semangat NKRI, Bhineka Tunggal Ika, serta Pancasila, dan itu merupakan kriteria dalam seleksi caleg khususnya di kabupaten Halmahera Barat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan calon-calon

legislative yang bukan hanya mempengaruhi popularitas tetapi juga punya kemampuan, kualitas, bertanggung jawab serta mampu membawa aspirasi masyarakat dan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Sistem penyeleksian dilakukan mengacu pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai PDI-perjuangan. Fakta berikut adalah tentang strategi kampanye partai politik yang akan digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kabupaten Halmahera barat pada pemilihan umum legislatif tahun 2019. Dari hasil dilapangan ditemukan bahwa strategi yang akan digunakan partai PDI-perjuangan kedepan tetap sama akan tetapi mengikuti perkembangan jika ada perubahan yang terjadi, seiring perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa strategi kampanye Partai PDI-Perjuangan dalam memenangkan Pemilu legislatif di Kabupaten Halmahera Barat, terdapat tiga strategi yang menjadi konsep yang dikemukakan oleh Firmanzah yaitu, push marketing, pass marketing, dan pull marketing. Dalam hal ini partai PDI-Perjuangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendidikan politik yang membuat masyarakat memahami akan pentingnya mengikuti pemilu. Selain itu, Partai PDI-Perjuangan di kabupaten Halmahera Barat berkampanye melalui media cetak seperti baliho, spanduk yang terpasang di pinggir jalan, dengan begitu agar Partai PDI-Perjuangan bisa lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya.

Strategi kampanye yang dilakukan partai PDI-Perjuangan sangat efektif dalam memenangkan Pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini program kerja yang disampaikan, pada saat kampanye, serta bantuan yang diberikan sasarannya kepada kelompok tani, nelayan, anak yatim dan keluarga kurang mampu. Hal ini bertujuan agar bisa mempengaruhi masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan perolehan jumlah suara PDI-Perjuangan sebanyak 8.766 suara dan total kursi sebanyak 4 kursi. Dengan ini hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa strategi kampanye yang dilakukan Partai PDI-Perjuangan berhasil dan efektif pada masyarakat di Pemilu tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Rainer, 2010. *Political Marketing: Strategi Membangun Konstituen Dengan Pendekatan PR*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Budiarjo Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Agung, Silih Wasesa. 2006. *Strategi Public Relation*. Gramedia : Jakarta
- Cangara Hafied, 2009. *Komunikasi Politik (konsep, Teori, dan Strategis)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Dan Nimmo, 2004. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Rosda Karya.
- Firmanzah Ph.D, 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah, 2012, *Marketing Politik*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).
- GM Sidarta, 2008. *Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Langsung*, Ciputat: Kalam Pustaka.
- Goodman J Douglas, Ritzer George, 2009. *Teori Sosiologi. Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Halim Abd, 2014. *Politik Lokal; Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya*, Yogyakarta: LP2B
- Mufti Muslim, 2012. *Teori-Teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nursal Adman, 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rabi;ah Ramidan, 2009. *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Rini Sulistya Endang, 2012. *Peran Pemasaran Politik Dalam Mempengaruhi Keputusan Pemilih*: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Sanit Arbi, 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata Sumadi, 1987. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Siswanto V. Aries, 2012. *Strategi Dan Langkah-langka Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta.
Schoder Peter, 2009. *Strategi politik edisi revisi pemilu 2009*, friedrick Neuman sifting furdie frienheid, Indonesia.

Sumber Lain:

- *UU No 7. Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*
- <https://kpuhalbar.go.id>
- <https://kabhalbar.bps.go.id>